

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan kegiatan sebuah organisasi dalam suatu perusahaan. salah satu fungsi anggaran yaitu sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merencanakan program/kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh organisasi sektor publik. Sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian, dimaksudkan dengan adanya anggaran pemasukan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Anggaran Publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan dan belanja dalam bentuk yang paling sederhana , anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari sudut organisasi meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Anggaran belanja dapat menjadi salah satu cermin kinerja dan kemampuan sebuah perusahaan dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan

keuangan yang dilakukan dengan efisien harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi, dan ternyata sering kali terjadi ketidaksesuaian antara target dan realisasi anggaran. Jika pengelolaan keuangan sudah efisien, maka ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dan pembangunan dan sebaliknya jika pengelolaan keuangan belum efisien, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran.

Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam melaksanakan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan.

Pelaksanaan anggaran memberikan implikasi bagi pemerintah untuk melakukan efisiensi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan, dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Dalam pengeluaran untuk itu pemerintah dituntut menerapkan pengelolaan biaya sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan seekonomis dan seefisien mungkin.

Umunya semua perusahaan atau lembaga pemerintahan berupaya untuk seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Di dalam kegiatan suatu perusahaan , seperti operasional, pemasaran, sumber daya manusia , dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. agar dapat menghasilkan hasil yang optimal salah satu faktor yang harus dicapai adalah efesiensi . sebab efesiensi adalah suatu target kinerja tertentu (*output*) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya (*input*) yang terendah, Maka dengan efesien akan berpengaruh dalam mengelola anggaran tersebut. Sesuai (PP RI 2010), dalam pelaksanaan belanja tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola anggarannya berdasarkan asas efektivitas, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 280 ayat (2) (UU RI 2014).

Pemerintahan provinsi Jawa Barat memiliki 38 Dinas, dari dinas-dinas itu ternyata Dinas Pemuda dan Olahraga dari efesiensi anggarannya di bawah realisasi dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat ini baru terbentuk pada tanggal 24 Oktober 2008 melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah (SOPD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nomenklatur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat (DISORDA JABAR), Pada tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Jawa Barat, Nomenklatur berubah menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat (DISPORA JABAR).

Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jawa Barat (DISPORA) merupakan dinas yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang olahraga dan pemuda perdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal utama yang dilaksanakan DISPORA yaitu mewujudkan dan meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga di provinsi Jawa Barat. Salah satu faktor untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya anggaran untuk operasional pelaksanaan kegiatan di DISPORA tersebut. Anggaran tersebut didapatkan dari APBD yang setiap tahunnya anggaran tersebut berbeda jumlahnya disesuaikan dengan rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan oleh DISPORA. Dimana Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat termasuk ke-14 besar seprovinsi Jawa Barat berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI PADA PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

Peringkat	Uraian	Belanja		
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
II	Dinas Pendidikan	3.690.817.588.801,00	2.752.405.183.133,00	6.443.222.771.934,00
IV	Dinas Kesehatan	166.193.168.967,00	1.056.617.386.637,00	1.222.810.555.604,00
III	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	69.781.164.491,00	1.863.762.039.642,00	1.933.543.204.133,00

VI	Dinas Sumber Daya Air	42.648.531.298,00	165.591.365.412,00	208.239.896.701,00
XI	Dinas Perumahan dan Pemukiman	25.127.832.725,00	113.942.641.200,00	139.070.473.925,00
XII	Dinas Sosial	50.605.084.250,00	78.967.016.118,00	129.572.100.368,00
XVI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59.101.793.955,00	46.193.821.060,00	105.295.615.015,00
XXIX	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga berencana	11.012.0731.740,00	26.958.217.000,00	37.970.948.740,00
XIII	Dinas Lingkungan Hidup	15.180.652.214,00	113.774.851.92,00	128.955.504.134,00
XXXV	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.712.314.510,00	9.097.307.820,00	17.810.622.330,00
XXVI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.458.351.490,00	28.310.450.000,00	41.768.801.490,00
VII	Dinas Perhubungan	39.523.317.287,00	165.201.335.000,00	204.724.652.287,00
XXVIII	Dinas Komunikasi dan Informasi	14.559.985.472,00	25.110.524.679,00	39.670.510.151,00
XXV	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	16.244.287.142,00	26.634.762.458,00	42.879.049.600,00
XXIV	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.220.498.222,00	34.009.525.000,00	57.230.023.222,00
XIV	Dinas Pemuda dan Olahraga	17.039.458.770,00	98.599.424.867,00	115.638.883.637,00
XXVII	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.335.633.000,00	21.944.558.250,00	40.280.191.250,00
XV	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.285.076.150,00	78.878.726.000,00	109.163.802.150,00
XXI	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	25.722.714.233,00	47.024.110.370,00	72.746.824.603,00
XVIII	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	37.820.959.736,00	64.289.348.000,00	102.110.307.736,00

VIII	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	96.475.733.351,00	90.096.703,123,00	186.572.436.474,00
XXIII	Dinas Perkebunan	18.144.555.092,00	51.047.560.350,00	69.192.115.442,00
IX	Dinas Kehutanan	104.057.422.950,00	78.079.941.376,00	182.137.364.326,00
XIX	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral	31.788.198.800,00	64.760.627.600,00	96.548.826.400,00
XVII	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45.854.371.058,00	57.010.310.000,00	102.864.681.058,00
XXXVI	Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah I	8.281.149.181,00	7.275.000.000,00	15.556.149.181,00
XXXVIII	Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah II	8.239.750.000,00	6.527.600.000,00	14.767.350.000,00
XXXVII	Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah III	8.104.965.729,00	6.802.570.000,00	14.907.535.729,00
XXXIV	Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah IV	9.633.615.907,00	8.740.100.000,00	18.373.715.907,00
XXXIII	Badan Penguhung	5.621.279.813,00	12.901.162.330,00	18.522.442.143,00
XX	Badan Perencanaan Pembagunan Daerah	20.469.152.600,00	56.183.133.000,00	76.652.285.600,00
I	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.081.409.629.701,00	176.427.726.770,00	20.257.837.356.471,00
V	Badan Pendapatan Daerah	340.250.043.000,00	366.963,751.336,00	707.213.794.336,00
XXII	Badan Kepegawaian Daerah	19.543.880.535,00	42.946.865.500,00	62.490.746.035,00
X	Badan Pengembangan	21.949.054.046,00	140.018.618.800,00	161.967.672.846,00

	Sumber Daya Manusia			
XXXI	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.550.423.404,00	13.329.982.000,00	20.880.405.404,00
XXXII	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.052.236.300,00	10.446.040.000,00	19.498.276.300,00
XXX	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.254.002.924,00	14.575.260.437,00	23.829.263.361,00

Sumber : <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1416>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang telah dihitung termasuk ke 14 besar seprovinsi Jawa Barat. Anggaran tertinggi yaitu Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp. 20.257.837.356.471,00.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018. Komponen-komponen dalam Laporan Realisasi Anggaran dapat dijadikan bahan untuk perhitungan anggaran belanja dengan menggunakan rasio efisiensi. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di dalamnya terdapat pendapatan di dalamnya terdiri pendapatan asli daerah, belanja di dalamnya terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel di perlukan usaha untuk meningkatkan kemampuan yakni meningkatkan

penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja pada dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.

Melakukan penelitian ini sangat penting dilakukan untuk meneliti kejadian di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, dimana berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada tahun 2014 sampai 2018, dalam realisasi anggaran belanja tersebut kurang optimal karena dilihat dari jumlah keseluruhan presentase pencapaian anggaran belanja rata-rata 84,7% kurang dari 95% yang mengacu pada (PMK RI 2015) , seperti tabel berikut.

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Perentase Pencapaian
2014	187.449.219.032.00	147.502.513.154.00	78.69%
2015	401.407.128.885.00	244.553.644.301.00	60.92%
2016	530.339.538.199.00	480.918.253.036.00	90.68%
2017	312.595.442.310.00	309.129.430.542.00	98.89%
2018	112.042.470.168.00	105.678.065.235.39	94.32%
TOTAL			84,7%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Diolah Peneliti).

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran (LRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat mengalami naik turun atau fluktuatif dalam presentasi pencapaiannya. Pada tahun 2014 realisasi anggaran belanja mencapai 78.69% kemudian pada tahun 2015 realisasi anggaran mengalami penurunan mencapai 60.92% kemudian pada tahun 2016 realisasi anggaran belanja mengalami kenaikan yang pesat mencapai 90.68% pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi mencapai 98.89% dan pada tahun 2018 mengalami kembali penurunan mencapai 94.32%. Pada saat observasi awal, peneliti mendapatkan informasi dari bagian Analisis Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi, Iwan Dermawan (2020), yang menuturkan alasan mengapa dalam realisasi anggaran belanja mengalami naik turun setiap tahunnya yaitu pada tahun 2014 mencapai presentasi sebesar 78.69% disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan tanah pembangunan infrastruktur area pacuan kuda yang tidak memikirkan secara matang titik lokasi pembangunan tersebut sehingga gagal atau tidak terealisasi, pada tahun 2015 adanya kegiatan PON di persiapan ada beberapa belanja terutama dari peralatan pertandingan PON tidak terealisasi sehingga capaian persentasenya kecil dan di dinas tersebut ada beberapa peningkatan venue tidak terealisasi sehingga anggaran ini jauh dalam peningkatannya dan di gelontongkan atau dimasukkan jadi anggaran yang tidak terserap di tahun 2015 dianggarkan lagi di tahun 2016 karena persiapannya sudah matang di 2015 di 2016 terealisasi sehingga mencapai presentase sebesar 90.68% dan pada tahun 2017 presentase pencapaian mencapai 98.89% naik lagi karena sudah tidak ada kegiatan PON sehingga serapannya pun bagus dan alasan mengapa tahun 2018 turun kembali dalam presentase pencapaiannya karena ada beberapa

anggaran untuk rapat-rapat yang disediakan dalam 1 tahun itu 10 kali ternyata yang terrealisasi hanya 5 kali.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK/02/2015 Pasal 3 ayat (1) dapat dilihat dari capaian kinerja anggaran taun sebelumnya, yaitu dengan presentase penyerapan anggaran dan capaian output paling sedikit 95% , serta laporan keuangan tersebut mendapatkan penghargaan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan realisasi anggaran belanja tahun 2014-2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dari keseluruhan presentase rata-rata pencapaian sebesar 84.7% hal ini dinas Pemuda dan olahraga provinsi jawa barat dalam merealisasikan anggaran belanjanya kurang optimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dalam merealisasikan anggaran belanjanya kurang optimal, di antaranya pertama lemahnya dalam perencanaan atau tidak terserapnya anggaran tersebut karena yang direncanakan dari beberapa program dan kegiatan ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Adapun waktu dalam pelaksanaan pun menjadi faktor dimana keterbatasan waktu dalam merencanakan dan melaksanakan program atau kegiatan kurang sehingga tidak terrealisasi. Berdasarkan pada paparan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“EFESIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014-2018”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun 2014-2018 belum terrealisasi dengan baik.
2. Kurang Optimalnya dalam mererealisasi Anggaran Belanja tahun 2014-2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018?
2. Apa Saja Faktor yang menjadi penghambat tidak efisiennya Anggaran Belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018?
3. Bagaimana upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi hambatan tidak efisiensinya anggaran belanja ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat tidak efesiennya Anggaran Belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi hambatan tidak efesiennya anggaran belanja tahun 2014-2018.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

- a. Kegunaan bagi peneliti adalah untuk menerapkan dan memberikan ilmu yang didapatkan selama kuliah dan juga memberikan referensi sebagai acuan dalam menilai Efisiensi anggaran belanja dalam perhitungan rasio efisiensi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Dinas Pemuda dan Olahraga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana Tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dari 5 Tahun kebelakang.

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.

c. Bagi Penulis

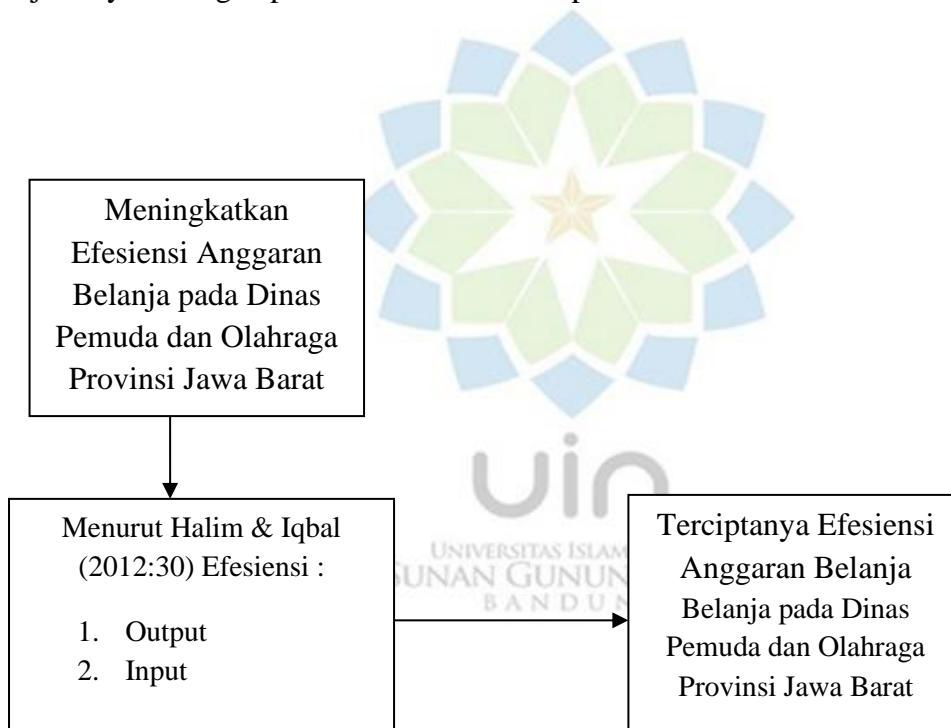
Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi syarat untuk lulus kuliah dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung rasio efisiensi dengan cara menganalisis dan menghitung anggaran belanja pada Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Jawa Barat.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut (Halim and Iqbal 2012) bahwa Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep efektifitas, yaitu rasio yang membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu target kinerja tertentu (*output*) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya (*input*) yang terendah. Teori ini sesuai dengan kebutuhan kajian penelitian yaitu mengenai efisiensi yang menjelaskan bahwa di dalam efisiensi terdapat rumusan rasio perbandingan antara *output* dengan *input* efisiensi yang akan digunakan untuk mengukur efisiensi anggaran belanja di DISPORA. (Halim 2008 dalam Pankey dan Pinatik 2015) Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pengeluaran dengan realisasi anggaran belanja yaitu diterima. Dengan rumus pengukuran efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Target anggaran belanja tidak langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja tidak langsung}} \times 100\%$$

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, maka kerangka pikir yang mendasari penelitian ini adalah bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat (DISPORA JABAR) sebagai salah satu instansi pemerintah tentunya dalam merealisasikan suatu anggaran dengan efisien dalam mengelolanya. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran di atas ditampilkan melalui skema berikut :



Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti), 2020

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Efisiensi Anggaran Belanja

G. Proposisi

Proposisi dalam penelitian ini bahwa Efisiensi anggaran belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018 berkaitan dengan Output,input.

